

# Jurnal Government



- **Rifai Nur**  
Gejolak Sosial di Kewedanaan Kendari Sulawesi Tenggara 1955-1958
- **Rahman**  
Responsivitas Kepemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Penerapan Prinsip-Prinsip Responsivitas Kepemerintahan Dalam Manajemen Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari)
- **Muhammad Nasir**  
Pelaksanaan Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan
- **Makmur Kambolong**  
Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Dalam Memberikan Pelayanan Publik Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
- **Abd. Rahman**  
Pengembangan Kompetensi Widyaiswara Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara
- **Murniati**  
Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan
- **La Ode Fahasini**  
Implementasi Pemerintahan yang Baik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Pendidikan Kota Kendari
- **Obed Bida dan Nur Yamin**  
Prospek Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kelurahan Gunungjati dan Kelurahan Mokoau Kota Kendari)
- **Edi Tadung**  
Efektivitas Penerapan Fungsi Koordinasi Pada Kantor Camat Unaaha Kabupaten Konawe
- **Suharty Roslan**  
Fenomena Perilaku Konsumerisme di Kalangan Mahasiswa
- **Rola Pola Anto**  
Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe)
- **Rabina Yunus**  
Model Peningkatan Peran Perempuan Dalam Perumusan Kebijakan Publik



<http://umkpress.umkendari.ac.id>

Diterbitkan Oleh :  
**Lembaga Penerbitan UMK Press**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI**  
<http://umkpress.umkendari.ac.id>



## SUSUNAN PENGELOLA JURNAL GOVERNMENT

Terbit dua kali setiap tahun (Edisi Maret dan Edisi September)

### **Penanggung Jawab:**

Dr. Rifai Nur, M.Hum.  
Drs. Muh. Arsyad, M.Si.  
Muh. Alamsah, S.Pd., M.Hum.

### **Ketua Penyunting:**

Dr. Jamaluddin Hos, M.Si.

### **Mitra Bebestari:**

Dr. Rifai Nur, M.Hum. (Universitas Haluoleo)  
Dr. Muh. Nuryamin, M.Si. (Universitas Haluoleo)  
Dr. H. Muh. Basri, M.Si. (Universitas Haluoleo)  
Dr. H. Abd. Kadir, M.Si. (Universitas Haluoleo)  
Dr. Eka Suaib, M.Si. (Universitas Haluoleo)

### **Penyunting Pelaksana:**

Drs. Muh. Arsyad, M.Si.  
Muh. Natsir, S.Sos., M.Si.  
Drs. H. Muh. Amir, M.Si.  
Wahyudin, S.IP., M.Si.  
Andi Syaiful, S.Sos., M.Si.

### **Administrator:**

Abd. Rahman, S.Sos., M.Si.

### **Alamat Lembaga Penerbitan UMK Press**

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 10 Kendari 93118 Telp./Fax. (0401) 3190710.

CP. 085342824451 Muh. Alamsah

085230893893 Basri Sufa

082346382275 Nurhidayat

Web: <http://umkpress.umkendari.ac.id> / Email: [umkpress@umkendari.ac.id](mailto:umkpress@umkendari.ac.id)

**PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL  
KETENTUAN PENULISAN JURNAL GOVERNMENT**

1. Naskah, harus merupakan hasil penelitian.
2. Naskah belum pernah diterbitkan dan tidak sedang diajukan ke jurnal atau majalah lain.
3. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sepanjang  $\pm$  15 halaman dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
4. Artikel memuat:
  - a. Judul artikel, idealnya tidak melebihi 12 kata yang menggunakan bahasa Indonesia, dan 10 kata yang menggunakan bahasa Inggris.
  - b. Nama penulis disertai nama program studi dan instansi penulis, dicantumkan sebagai catatan kaki lembaran pertama artikel.
  - c. Abstrak, menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan terdiri atas satu paragraf, yang uraiannya secara utuh, dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan.
  - d. Kata kunci
  - e. Sistematika Isi:
    - Pendahuluan**
    - Metode Penelitian**
    - Hasil dan Pembahasan**
    - Penutup**
    - Daftar Pustaka (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian saja).**
5. Memberi kontribusi biaya penerbitan sebesar Rp. 250.000
6. Artikel dikirim atau dimasukkan ke pengelola jurnal paling lambat 2 bulan sebelum penerbitan yaitu bulan Januari untuk terbitan Maret; dan bulan Juli untuk terbitan September. Artikel dikirim kepada:

Lembaga Penerbitan UMK Press  
d.a. Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 10 Kota Kendari 93118 Telp./Fax. (0401) 3190710.  
CP. 085342824451 Muh. Alamsah  
085230893893 Basri Sufa  
082346382275 Nurhidayat  
Atau e-mail: [umkpress@umkendari.ac.id](mailto:umkpress@umkendari.ac.id)
7. Hasil pemeriksaan ketua penyunting dan mitra bebestari terhadap artikel penulis; akan diinformasikan melalui telepon atau e-mail kepada penulis artikel.

## DAFTAR ISI

Susunan Pengelola .....	i
Pedoman Penulisan Artikel .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>1. Rifai Nur</b> Gejolak Sosial di Kewedanaan Kendari Sulawesi Tenggara 1955-1958 .....	1
<b>2. Rahman</b> Responsivitas Kepemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Penerapan Prinsip-Prinsip Responsivitas Kepemerintahan Dalam Manajemen Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari) .....	16
<b>3. Muhammadiyah Nasir</b> Pelaksanaan Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.....	23
<b>4. Makmur Kambolong</b> Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Dalam Memberikan Pelayanan Publik Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.....	39
<b>5. Abd. Rahman</b> Pengembangan Kompetensi Widyaiswara Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara.....	55
<b>6. Murniati</b> Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan...	63
<b>7. La Ode Fahasini</b> Implementasi Pemerintahan Yang Baik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Pendidikan Kota Kendari.....	76
<b>8. Obed Bida dan Nur Yamin</b> Prospek Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kelurahan Gunungjati dan Kelurahan Mokoau Kota Kendari) .....	96
<b>9. Edi Tadung</b> Efektivitas Penerapan Fungsi Koordinasi Pada Kantor Camat Unaaha Kabupaten Konawe .....	105
<b>10. Suharty Roslan</b> Fenomena Perilaku Konsumerisme di Kalangan Mahasiswa.....	123
<b>11. Rola Pola Anto</b> Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe) .....	137
<b>12. Rabina Yunus</b> Model Peningkatan Peran Perempuan Dalam Perumusan Kebijakan Publik.....	153

**PROSPEK PENINGKATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**(Studi di Kelurahan Gunungjati dan Kelurahan Mokoau Kota Kendari)**  
**Oleh: Obed Bida<sup>8</sup> dan Muh. Nur Yamin<sup>9</sup>**

**Abstrak:** Penelitian bertujuan untuk mengetahui prospek peningkatan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Gunung Jati dan Kelurahan Mokoau Kota Kendari. Prospek meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan didasarkan pendapat G. Kartasaputra et.al. (1998) keberhasilan pemungutan pajak bumi dan bangunan terdapat dua pihak yang berperan yaitu pihak petugas pemungut pajak dan wajib pajak terdapat hubungan yang saling berkait.

Penelitian menggunakan metode evaluatif dan Populasi diambil dari masyarakat di Kelurahan Gunung Jati dan Kelurahan Mokoau Kota Kendari. Teknik pengumpulan data dengan wawancara 40 kepala keluarga yang berdiam di kedua kelurahan tersebut, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif (Miles dan Huberman, 1992). Hasil penelitian menunjukkan upaya pemerintah belum mencapai target dikarenakan faktor subyek pajak belum memahami pengenaan obyek pajak bumi dan bangunan (PBB), Kemampuan Petugas (Kolektor) masih kurang berkualitas, dan penagihan masih menunggu masyarakat untuk datang sendiri membayar. Prospek peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, masyarakat baru akan melunasi pajaknya setelah ada desakan dari pemerintah, peningkatan kemampuan petugas memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan karena sangat mempengaruhi kemampuan berkarya, dan sistem pendataan obyek pajak adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk mengisi dan menghitung sendiri besarnya pajak yang dibebankan kepadanya namun hambatan dalam penyusunan data seringkali tidak akurat.

Upaya peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan dari wajib pajak yang rendah dipengaruhi oleh faktor kurangnya kemampuan aparat dalam memahami masalah perpajakan, dan rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam melunasi iuran pajaknya serta sikap petugas perpajakan yang bertindak lebih tegas terhadap pembayaran pajaktahun pajak yang berjalan wajib pajak.

**Kata Kunci: Prospek Peningkatan Pajak Dan Kemampuan Personil**

**The Land and Building Tax Raising Prospect (The Case study in sub-district of Gunungjati and sub-district of Mokoau at Kendari City)**

**Abstrack:** The objective of this research is investigated the land tax raising prospect together effort The collector has reached target surplus income and tax at Administered of GunungjatiVillage and Administered of Mokoau Village Kendari City, the prospect raising to income land tax is studied based with by Wiwoho (1999:39) a successfully to manage land tax how about rore two sectors: apparatus (cotlector) and tax obligation.

The method in this research is an descriptive survey with Technics of data collecting with interview 40 family head which is populating. The result of research indicate to the land tax raising prospect (PBB) to increase payment not expand yet, and so tax obligation dicipline godless. The land tax income decended influence three factors: skill apparatus, incentive the collector taxes, and tax obligation consciosness. Therefore the land tax payment needs increasing capability and skill cotector and then the tax obligation need explicite punishment for increasing land tax income.

<sup>8</sup> Dosen Pada Universitas Terbuka UPBJJ Kendari

<sup>9</sup> Dosen Tetap Pada Fisip Universitas Halu Oleo Kendari

Analyst data technique use model of interaktif ( Miles and of Hubermann, 1992). Result of research show government effort not yet reached goals because factor of subject lease not yet comprehended imposition of land tax object and building ( PBB), ability of officer ( collectors) still less with quality, and addiction wait society to come himself for pay.

Prospect is make-up of acceptance of land tax and building awareness of society as tax pay, society will pay its lease after pressure of government, make-up of ability of officer give opportunity continue education, and data system of object lease is tax payer given by trust to fill and calculate himself, the level of charged upon lease is him but resistance in compilation of inaccurate data often times. Effort acceptance of land tax and building tax payer which is lack of ability of government officer in comprehending the problem of taxation, and lower him awareness of tax payer society in paying its lease fee.

**Keyword: Raising Prospect** of Land tax and building and ability of personnel

---

## PENDAHULUAN

---

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang potensial dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, maka perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah selain daripada itu kesadaran masyarakat wajib pajak dalam hal ini pengetolaannya harus diperhatikan. Pengelolaan berarti mengurus, melakukan, dan menyelenggarakan pekerjaan. Kegiatan pengelolaan pajak tidak terlepas dari adanya peranan penting antara administrasi dan manajemen karena administrasi merupakan proses kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan manajemen merupakan kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Menyadari pentingnya penerimaan pajak dalam hal ini pajak bumi dan bangunan sebagai sumber penerimaan negara dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan, maka perlu adanya suatu pengelolaan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai hal tersebut membutuhkan kerjasama antara pemerintah (pemungut pajak) dengan masyarakat sebagai wajib pajak. G. Kartasaputra et.al. (1998) menjelaskan bahwa pada dasarnya keberhasilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan terdapat dua pihak yang berperan dalam menentukan kelancaran, keteraturan dan ketepatan proses pemungutan yaitu aparat atau petugas pemungut yang telah ditunjuk sesuai undang-undang yang berlaku dan para wajib pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Dengan demikian antara pihak petugas pemungut pajak dan wajib pajak terdapat hubungan yang saling berkait serta saling mendukung karena keberhasilan pemungutan tersebut ditentukan oleh kedua belah pihak tersebut.

Kemampuan aparat pemungut pajak erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan kemampuan teknis yang diperoleh melalui lembaga pendidikan dan latihan atau kursus masalah perpajakan. Salamun (1997) mengatakan bahwa menyadari pentingnya pengelolaan pemungutan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara untuk pembayaan, maka perlu adanya peningkatan kemampuan aparat pemungut disamping prosedur dan kesadaran masyarakat wajib pajak. sehubungan dengan hal tersebut. Menurut Atep AB (1998) pembaharuan perpajakan memerlukan pembenahan aparatur perpajakan, baik menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin, maupun mental, sehingga diharapkan beban pajak semakin adil dan wajar. Hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban secara sadar dan mencegah adanya penghindaran pajak. Pajak sebagai prestasi yang dapat dipaksakan kepada publik menurut norma-norma umum yang ditetapkan olehnya tanpa ada kontra prestasi yang bersifat perorangan tertentu sebagai penggantinya. Selanjutnya Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuan.

Ketidak patuhan sebagai ketidak mampuan wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan peraturan atau undang-undang dan administrasi perpajakan yang berlaku menurut Ma'rie Muhammad (1994) memerlukan pemahaman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya peranan pajak bagi negara untuk mampu melaksanakan pembangunan nasional guna terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Kepatuhan ditentukan oleh karakteristik-karakteristik dari figur otoritas dan kehadirannya secara fisik dipengaruhi oleh intensitas atau tingkat kepatuhan. Individu akan cenderung mengembangkan kepatuhan yang kuat terhadap perintah melakukan suatu tindakan yang menurut persepsinya baik atau penting.

Bahl dan Vazquez dalam Bird dan Jantscher (1992) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan di negara-negara berkembang umumnya masih mempunyai kelemahan yang ditandai dengan prosedur yang sudah usang, pegawai dibayar rendah, pegawai kurang terlatih, sistem perpajakan yang terlalu kompleks sehingga sulit untuk mencapai efisiensi administrasi dengan sumberdaya yang tersedia sangat minim bagi kantor pusat pajak, dan keengganan pemerintah untuk menegakkan sistem yang ada. Secara sepiantas, tujuan utama pajak adalah menyediakan sumber-sumber penerimaan untuk pembiayaan negara, Menurut Ambia Adek (1994) upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak perlu kebijakan penyederhanaan pajak agar pengelolaan pajak menjadi efisien

dan disesuaikan kondisi masyarakat, aspek keadilannya, dan implikasi terhadap efisiensi ekonomi. Berdasarkan fenomena tersebut maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana prospek peningkatan pajak bumi dan bangunan dikelurahan Gunung Jati dan Kelurahan Mokoau Kota Kendari.

---

## METODE PENELITIAN

---

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode evaluatif dan dilaksanakan di Kelurahan Gunungjati dan Mokoau Kota Kendari. Populasi diambil dari kepala keluarga yang berdiam dikelurahan Gunung Jati dan Kelurahan Mokoau Kota Kendari untuk dijadikan informan. Tehnik pengumpulan data dengan wawancara yaitu mengadakan tanya jawab kepada informan sejumlah 40 kepala keluarga dengan menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi laporan resmi instansi perpajakan dan kantor kelurahan. Teknik analisis data dari data hasil wawancara di lapangan akan dianalisa menggunakan model interaktif (Miles dan Hubermann, 1992) kemudian membandingkan dengan data sekunder tentang besarnya penerimaan pajak bumi dan bangunan selama 3 tahun terakhir 2003-2006 serta berbagai cara pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

---

### **Upaya Pemerintah Untuk Mencapai Target Yang Ditetapkan di Kelurahan Gunung Jati dan Kelurahan Mokoau**

Mengingat peranan sektor perpajakan sangat penting dalam menunjang penerimaan daerah guna membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintah sebagai konsekuensi logis bagi suatu daerah otonom, maka pengelolaan pajak perlu dilakukan secara efisien. Efisiensi perpajakan sebagai ketetapan dalam seluruh proses kegiatan pengelolaan pajak dimulai dari kegiatan menghimpun data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak sampai pada kegiatan pemungutan obyek dan pendistribusiannya.

Tabel 1: Realisasi Penerimaan Pajak Bumidan Bangunan Di Kelurahan Gunung Jati dan Kelurahan Mokoau Tahun 2004-2006

Kelurahan	Persentase Realisasi Tahun		
	2004	2005	2006
Gunungjati	73,95	62,78	71,41
Mokoawu	82,09	77,27	76,91

Sumber: Kantor Kelurahan Mokoau dan Kel. Gunung Jati, 2007

Upaya peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan dikelurahan Gunungjati dan Mokoau dilakukan sebagai berikut:

### **Peningkatan Penyuluhan Pajak**

Hasil wawancara kepada masyarakat subyek pajak disimpulkan bahwa mereka umumnya belum atau tidak mengetahui sebenarnya pajak bumi dan bangunan, baik obyek pajak yang dikenai pajak, prosedur pembayaran, jumlah yang harus dibayar berdasarkan obyek pajak yang mereka miliki maupun manfaat dan pentingnya membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan. Untuk itu perlu diadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat subyek pajak agar mereka tahu secara keseluruhan tentang pajak bumi dan bangunan.

### **Peningkatan Kemampuan Petugas (Kolektor)**

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya membayar pajak, maka mutu pelayanan dibidang perpajakan perlu menjadi perhatian penting pemerintah dalam upaya memenuhi target pencapaian pajak bumi dan bangunan. Personalia pemungut pajak yang bertugas di kedua wilayah ini dari segi kuantitas sudah mencukupi tetapi kualitas (kemampuan) yang dimiliki personalia masih kurang, terlihat dari kualitas pendidikan mereka 74 % berpendidikan sekolah menengah umum dan petugas pemungut PBB belum pernah mengikuti pendidikan dan latihan keterampilan khusus berkaitan dengan perpajakan. Akibat dari hal ini, sebagian besar personalia pemungut kurang menguasai tugas perpajakan yang dibebankan kepada mereka secara profesional, sehingga kadang kala menimbulkan kesulitan pada saat pemungut pajak dilapangan. Hal ini terungkap dari kesimpulan hasil wawancara subyek pajak berupa keluhan kurang merasa puas terhadap cara-cara penyampaian dan menagih pajak yang dilakukan petugas tersebut.

### **Peningkatan Penagihan**

Besarnya tunggakan pajak pada kelurahan Gunung Jati dan Mokoau perlu dicarikan solusinya diantaranya yang seharusnya dilakukan para petugas adalah meningkatkan penagihan bukan menunggu masyarakat untuk datang sendiri membayar. Peningkatan penagihan sangat dimungkinkan untuk dapat lebih meningkatkan jumlah penerimaan pajak karena masyarakat subyek pajak secara psikologis akan merasa betul-betul berkewajiban untuk segera membayar pajak.

## **Prospek Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Gunung Jati dan Kelurahan Mokoau**

Mengenai prospek upaya yang perlu diupayakan terhadap pencapaian target dalam meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan:

### **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak**

Berdasarkan kesimpulan data hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat sebagai wajib pajak di dua kelurahan pada umumnya kurang menyadari pentingnya pembayar pajak bumi dan bangunan untuk membiayai pembangunan di Kota Kendari walaupun pada sisi lain sebagai wajib pajak sebagian dari mereka ada yang berkeinginan untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal ini membayar pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kesimpulan tersebut tergambar pada tabel berikut

Tabel. 2: Kesadaran Informan Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Gunung Jati dan Mokoau Tahun 2007

No	Tanggapan Responden	Kelurahan Gunungjati	Kelurahan Mokoau	Jumlah	Persentase
1	Kesadaran Tinggi	3	4	7	17,5
2	Cukup sadar	5	7	12	30,0
3	Kurang sadar	12	9	21	52,5
Jumlah		20	20	40	100

Sumber: Hasil olah data primer, Tahun 2007

Mengenai kesadaran informan membayar pajak bumi dan bangunan terlihat bahwa masyarakat baru akan melunasi pajaknya setelah ada desakan dari pemerintah, sedangkan yang menyatakan (tanpa ditagih) baru sebagian kecil masyarakat yang memenuhi kewajibannya secara sadar untuk turut serta dalam membayar pajak guna membiayai pembangunan.

### **Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Petugas (Kolektor)**

Peningkatan kemampuan dan keterampilan petugas kolektor pajak bumi dan bangunan secara profesional dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan senantiasa mengusahakan mereka untuk menjadi tenaga ahli dan terampil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai petugas pemungut pajak bumi dan bangunan. Hal ini ditempuh dengan memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan baik formal maupun teknis yang mempunyai hubungan dengan pelaksana pajak bumi dan bangunan. Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh petugas pajak bumi dan bangunan sangat mempengaruhi kemampuan berkarya.

### Sistem Pendataan Obyek Pajak

Berbagai upaya pemerintah telah dilaksanakan untuk menyederhanakan peraturan pajak agar dimengerti oleh segenap anggota masyarakat sebagai wajib pajak misalnya dengan pengisian surat pemberitahuan obyek pajak (SPOP) yang diisi sendiri oleh wajib pajak dan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) yang jelas, dimana kepada wajib pajak diberi kepercayaan untuk mengisi dan menghitung sendiri besarnya pajak yang dibebankan kepadanya, selanjutnya disetor atau dibayarkan kepada fiskus.

Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan di dua kelurahan adalah dalam penyusunan data sehingga menjadi tidak akurat disebabkan pengembalian yang terlambat serta pengisian yang kurang akurat. Sistem pendataan obyek pajak yang belum memadai ini, erat kaitannya dengan masalah pengawasan oleh para petugas perpajakan dalam hal ini pengawasan terhadap laporan wajib pajak tentang obyek pajak yang dimilikinya yang tertuang dalam surat pemberitahuan obyek pajak (SPOP).

Tabel 03. Keikutsertaan Informan dalam Pemeriksaan Surat Pemberitahuan obyek pajak (SPOP) wajib pajak Di Kelurahan Gunungjati dan Kelurahan Mokoau Tahun 2007

No.	Tanggapan Masyarakat	Frekuensi	Persentase
1	Ikut mendata dan meneliti SPOP Wajib pajak	9	22,50
2	Tidak ikut mendata tetapi Meneliti SPOP	5	12,50
3	Ikut mendata dan tidak meneliti	7	17,50
4	Tidak ikut kedua-duanya	19	47,50

Sumber: Hasil Olahan Data primer, Tahun 2007

Berdasarkan data tersebut sudah barang tentu sangat berpengaruh terhadap hasil penerimaan pajak di lapangan. Dengan demikian target yang telah direncanakan sulit untuk terealisasi sepenuhnya. Sebagai konsekuensinya para petugas di kedua kelurahan tersebut harus lebih giat melakukan pengecekan terhadap laporan wajib pajak tentang obyek pajak yang dimilikinya dalam menyampaikan SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak yang bersangkutan.

### Pembahasan

Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat daerah yang berkepentingan sehingga sebagian besar hasil PBB diserahkan kepada pemerintah daerah. Penggunaan pajak demikian merangsang masyarakat memenuhi kewajiban membayar pajak yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong-royongan

membiyai pembangunan daerah. Seorang yang berpendidikan akan membawa dirinya berinteraksi dengan lingkungannya, wajib pajak tidak patuh membayar hutang pajaknya karena kurangnya pengetahuan pentingnya pajak sehingga menjadi penghambat. Menurut Ambia adek (1994) pendidikan wajib pajak diperlukan untuk menciptakan wajib pajak yang tahu, mau dan mampu melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik.

Mewujudkan terselenggaranya perpajakan yang baik dan sehat sehingga dapat menunjang penerimaan negara, pemerintah berusaha melakukan peningkatan sistem perpajakan, intensifikasi pemungutan pajak, pemeliharaan aparat yang jujur dan bersih. Menurut Atep AB (1989) pembaharuan perpajakan menghendaki pembenahan aparatur perpajakan baik menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin dan mental. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak melalui sosialisasi peraturan, meningkatkan sumberdaya manusia (petugas) melalui pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan teknis operasional, sistem manajemen yang profesional, dan perlu diusahakan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Menurut Ma'rie Muhammad (1994) sosialisasi perpajakan ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak termasuk pemungut pajak untuk memungut dan menyetor pajak. Dengan demikian perpajakan itu memerlukan sarana yang harus memadai dan pelaksana yang profesional, dan kesadaran masyarakat akan maksud dari pajak yang mereka bayarkan.

---

## PENUTUP

---

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari wajib pajak, para wajib pajak tidak semuanya melaksanakan kewajibannya untuk membayar PBB secara benar. Dengan demikian setiap tahunnya jumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB semakin meningkat di dua kelurahan, hal ini terlihat dari realisasi penerimaan PBB dari target yang diperkirakan. Realisasi penerimaan PBB yang rendah dipengaruhi oleh faktor kurangnya kemampuan aparat pemungut PBB dalam memahami dan menguasai UU perpajakan, dan rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam melunasi iuran pajaknya. Hal ini terjadi karena kurangnya frekuensi penagihan oleh petugas pajak yang lebih banyak menunggu ditempat.

2. Penggunaan form sistem pendataan objek pajak tidak sederhana dan transparansi pemungutan dan pemanfaatan PBB tidak jelas bagi subyek pajak, menyebabkan kesadaran untuk patuh membayar PBB oleh subyek pajak menjadi rendah.

---

#### DAFTAR PUSTAKA

---

- Andreoni, James and J. Feinstein, 1998. Tax compliance, *Jornalof Economic Literatur*. Vol.36 Hlm. 818-860.
- Bird, Richard M. dan Milka Casanegra de Janster, 1992. *Improveing Tax Administration in Developing Countries*, Washinton: International Monetary Fund.
- Salamun AT., 2001. *Pajak Citra dan Upaya pembaurannya*. PT Bina Rean Perwira. Jakarta.
- AA Barata dan Za Ardian, 1998. *Perpajakan*. Armico Bandung
- G. Kartasapoetra, E. Komaruddin, dan Rience G.tasapoetra, 1999. *Pajak Bumi dan Bangunan prosedur dan Pelaksanaannya*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Ma'rie, 1994. *Peranan Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Khusus di Bidang Perpajakan*. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, Jakarta.
- Rahmat Soemitro, 1996. *Pajak Bumi dan Bangunan* . PT Eresco, Bandung
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Devas, Nick dan Brian Binder, 1989. *Administrasi Penerimaan daerah, dan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI Press, Jakarta.